BPP
BADAN PENGARAH PAPUA

LAPORAN
BULANAN
BP3OKP PAPUA SELATAN
JULI 2025

OLEH:
TIM BP3OKP PAPUA SELATAN

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya, Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) Perwakilan Provinsi Papua Selatan dapat menyelesaikan Laporan Bulanan Kegiatan Juli 2025 ini dengan baik. Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban sekaligus evaluasi terhadap pelaksanaan program Otonomi Khusus (Otsus) yang berorientasi pada pemberdayaan Orang Asli Papua (OAP) dan percepatan pembangunan berbasis kearifan lokal.

Sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021, BP3OKP Papua Selatan berkomitmen untuk memastikan Dana Otsus dimanfaatkan secara tepat sasaran, transparan, dan akuntabel. Selama bulan Juli 2025, kami telah melaksanakan berbagai kegiatan strategis, mulai dari koordinasi lintas lembaga, advokasi kebijakan, hingga pendampingan teknis di bidang pendidikan, kesehatan, dan tata kelola pembangunan. Capaian utama meliputi kesepakatan pendirian Fakultas Kedokteran di Universitas Musamus Merauke, penguatan sistem rujukan kesehatan dengan RSUP Jayapura, serta sinkronisasi RPJMD Provinsi Papua Selatan dengan indikator Otsus.

Laporan ini juga memuat tantangan, rekomendasi, dan rencana tindak lanjut sebagai bahan perbaikan untuk bulan berikutnya. Kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat: pemerintah pusat, pemerintah daerah, tokoh adat, mitra pembangunan, serta kelompok kerja (Pokja) BP3OKP yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan program.

Kami menyadari masih terdapat kekurangan dalam proses pelaporan ini. Oleh karena itu, saran dan kritik konstruktif sangat kami harapkan untuk peningkatan kualitas kerja ke depan. Semoga laporan ini dapat menjadi referensi bagi semua pemangku kepentingan dalam mewujudkan Papua Selatan yang Cerdas, Sehat, dan Produktif.

Merauke, 13 Agustus 2025
Kepala BP3OKP Provinsi Papua Selatan

BADAN PENGARAH PERCEPATAN PEMBANGUNAN OTONOMI KHUSUS PAPUA
SEKRETARIAT BP3OKP MERAUKE

Yoseph Yanawo Yolmen,S.Pd.,M.Si.,MRSC
NIP: 999920240117145257

I. PENDAHULUAN

Sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, Pemerintah membentuk Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) guna memastikan percepatan pembangunan yang adil, merata, dan berkelanjutan di Tanah Papua. BP3OKP hadir untuk memperkuat tata kelola Dana Otsus serta memastikan agar pelaksanaannya tepat sasaran, sesuai kebutuhan riil masyarakat adat, dan sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan sosial.

Dalam konteks tersebut, BP3OKP Perwakilan Provinsi Papua Selatan menjalankan fungsi strategis sebagai fasilitator, penghubung, dan pengarah bagi program-program pembangunan daerah berbasis Otonomi Khusus. Melalui keterlibatan aktif para anggota dan kelompok kerja (Pokja), BP3OKP Papua Selatan terus mendorong pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang menyentuh langsung kepentingan Orang Asli Papua (OAP), baik di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial budaya, maupun infrastruktur dasar.

Laporan ini disusun sebagai bentuk dokumentasi, akuntabilitas, dan evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan sepanjang bulan Juni 2025 oleh para anggota dan kelompok kerja BP3OKP Provinsi Papua Selatan. Laporan ini mencakup rincian kegiatan strategis, hasil yang dicapai, tantangan yang dihadapi, serta rekomendasi tindak lanjut guna mendukung terwujudnya Papua Selatan yang Cerdas, Sehat, dan Produktif. Serta Kegiatan-kegiatan yang dilakukan merupakan bagian dari strategi percepatan pembangunan daerah otonom khusus berbasis kearifan lokal dan pemberdayaan masyarakat adat Papua.

II. TUJUAN

a. Mendokumentasikan seluruh aktivitas Pokja dan anggota BP3OKP secara sistematis.
b. Mengevaluasi capaian program kerja bulanan.
c. Menjadi acuan untuk perencanaan kegiatan bulan berikutnya.

III. DASAR HUKUM

a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.
b. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2001 Tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua.
c. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 Tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua.
d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.07/2023 tentang Perubahan atas PMK Nomor 76/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Penerimaan Dalam Rangka Otonomi Khusus.
e. Surat Edaran Bersama Dirjen Perbendaharaan dan Dirjen Perimbangan Keuangan Nomor SE-44/PB/2022 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Tata Kelola Penerimaan Dalam Rangka Otonomi Khusus Papua.
f. Peraturan Ketua Badan Pengarah Papua Nomor 01 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengarah Papua
g. Peraturan Kepala Sekretariat Badan Pengarah Papua Nomor PER- 2/SETBPP/JYP/2023 tentang Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengarah Papua
h. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2023 Tentang Program Percepatan Pemenuhan Kebutuhan Guru Melalui Pendidikan Guru Di Provinsi Papua
i. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dalam Rangka Otonomi Khusus

IV. RUANG LINGKUP

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi (SHEK) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun

2021 tentang Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, Badan Pengarah Papua (BPP) melaksanakan kegiatan Program.

Adapun ruang lingkup kegiatan Pokja Papua Cerdas BPP PPS dalam pelaksanaan OTSUS Papua sesuai dengan palaksanaan pembangunan Papua khususnya Papua Selatan secara general, sebagai berikut :

a. Sinkronisasi Program dan Kebijakan

- Menyatukan dan menyelaraskan program-program kerja dari berbagai instansi dan lembaga terkait di Provinsi Papua Selatan agar sejalan dengan kebijakan nasional dan peraturan daerah terkait Otsus.
- Menyusun rencana kerja bersama yang memuat target, indikator keberhasilan, serta jadwal pelaksanaan kegiatan yang terintegrasi. dengan arah kebijakan nasional serta memenuhi prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

b. Harmonisasi Data dan Informasi

- Bersinergi dan berkolaborasi dalam mengintegrasikan data potensi, kebutuhan, dan perkembangan pendidikan di Papua Selatan guna mendukung pengambilan keputusan yang berbasis data.
- Menyusun basis data yang komprehensif dan *up-to-date* terkait hasil evaluasi dan monitoring program Otsus di bidang pendidikan dan kesejahteraan masyarakat..

c. Evaluasi Kinerja dan Akuntabilitas Program

- Melakukan penilaian terhadap efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program Pokja Papua Cerdas.
- Menyusun laporan evaluasi berkala untuk mengidentifikasi capaian dan kendala dalam pelaksanaan program serta merekomendasikan langkah perbaikan..

d. Koordinasi Internal dan Eksternal

- Melaksanakan pertemuan rutin dan dialog lintas sektor untuk memastikan adanya komunikasi yang efektif antar anggota Pokja, pemerintah daerah, masyarakat, dan pihak terkait lainnya.
- Menyusun mekanisme koordinasi yang jelas agar setiap kegiatan berjalan sesuai rencana dan mampu menyesuaikan terhadap dinamika yang berkembang..

e. Penguatan Kapasitas dan Pengembangan Sumber Daya

- Melakukan pelatihan dan peningkatan kapasitas anggota Pokja serta aparat terkait dalam bidang evaluasi, pengumpulan data, dan pengelolaan program.
- Mendorong partisipasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat dalam proses pengawasan dan keberlanjutan program.

f. Pelaporan dan Transparansi

- Mengembangkan sistem pelaporan yang transparan dan akuntabel kepada seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat Papua Selatan.
- Menyebarluaskan hasil evaluasi dan perkembangan pelaksanaan program secara berkala dan terbuka.

V. RICIAN KEGIATAN

Sebagai bagian dari pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) di Provinsi Papua Selatan, para anggota dan kelompok kerja (Pokja) telah melaksanakan berbagai kegiatan strategis sepanjang bulan Juli 2025. Kegiatan-kegiatan ini mencerminkan komitmen BP3OKP dalam mendukung percepatan pembangunan yang berbasis kearifan lokal, berorientasi pada pemberdayaan masyarakat adat, dan berlandaskan prinsip transparansi serta akuntabilitas.

Kegiatan yang dilakukan mencakup pelibatan dalam agenda nasional, koordinasi lintas lembaga, pelatihan dan pemberdayaan masyarakat, advokasi kebijakan, serta audiensi dengan kementerian/lembaga strategis. Seluruh kegiatan ini diarahkan untu mendukung pelaksanaan Dana Otonomi Khusus secara lebih efektif dan menyeluruh, serta memastikan keterlibatan aktif Orang Asli Papua (OAP) dalam setiap tahapan pembangunan.

Berikut ini adalah rangkuman kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Anggota BP3OKP dan anggota Pokja BP3OKP Provinsi Papua Selatan selama bulan Juli 2025, beserta tujuan, lokasi, dan hasil/output yang dicapai.

A. Anggota BP3OKP/ BPP Papua Selatan

Rincian pelaksanaan kegiatan Anggota BPP-PPS, bulan juli tahun 2025, terurai secara berurutan sebagai berikut.

1. Menghadiri Kunjungan Kerja Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Ri Ke Universitas Musamus Merauke.

a. Waktu dan Tempat

Pada tanggal 03 Juli 2025, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia, Prof. Brian Yuliarto, Ph.D., melakukan kunjungan kerja ke Universitas Musamus (UNMUS) Merauke dalam rangka memberikan kuliah umum serta menjaring aspirasi melalui kegiatan bertajuk "DIKTISAINTEK Berdampak untuk Papua". Acara ini merupakan bagian dari upaya pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan pendidikan tinggi dan teknologi sains di wilayah Papua, khususnya Papua Selatan, dalam kerangka Otonomi Khusus.

b. Peserta Kegiatan

Kegiatan ini dihadiri oleh:

- Civitas Akademika UNMUS (Rektor, dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan).
- Gubernur Provinsi Papua Selatan.
- Bupati Merauke dan Bupati Mappi.
- Kepala BP3OKP Perwakilan Provinsi Papua Selatan.
- Tokoh masyarakat dan adat.

c. Hasil Kunjungan dan Kesepakatan Penting

Dalam kunjungan tersebut, Menteri DIKTISAINTEK menyetujui tiga poin kebijakan strategis untuk pengembangan pendidikan tinggi di Papua Selatan, yaitu:

- Pendirian Fakultas Kedokteran (FK) dan Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) di UNMUS.
- Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan sebagai sarana pendukung pembelajaran dan pelayanan kesehatan masyarakat.
- Pengangkatan Dosen P3K dengan pemenuhan hak-hak profesional, termasuk tunjangan, untuk meningkatkan kualitas pengajaran.

Setelah audiensi, Gubernur Papua Selatan langsung menginstruksikan pembentukan Panitia Persiapan Pendirian Prodi Kedokteran dan Kesehatan Masyarakat dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

- Perwakilan UNMUS (Rektorat dan Fakultas terkait).
- Pemerintah Provinsi Papua Selatan (Dinas Pendidikan dan Kesehatan).
- Kepala BP3OKP Papua Selatan (sebagai koordinator percepatan Otsus).

- DPRP (Dewan Perwakilan Rakyat Papua).
- Pemerintah Kabupaten (Merauke, Mappi, Asmat, Boven Digoel).
- MRP (Majelis Rakyat Papua).

Panitia ini bertugas menyiapkan segala kebutuhan administratif, infrastruktur, dan kurikulum untuk segera merealisasikan program studi tersebut.

d. Peran BP3OKP Papua Selatan

Sebagai badan pengarah pembangunan Otonomi Khusus, BP3OKP Papua Selatan akan:

- Memfasilitasi koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, dan UNMUS.
- Memantau progres pendirian FK/FKM dan rumah sakit pendidikan sesuai timeline.
- Memastikan keterlibatan masyarakat adat dalam proses pembangunan untuk keberlanjutan program.

e. Rencana Tindak Lanjut

- Penyusunan Roadmap Pendirian FK/FKM (melibatkan KEMENDIKBUDRISTEK dan KEMENKES).
- Pengajuan anggaran melalui Dana Otsus dan APBD.
- Sosialisasi ke masyarakat tentang manfaat program ini bagi pengembangan SDM Papua.

f. Dokumentasi Kegiatan

2. Menghadiran Pelantikan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Provinsi Papua Selatan.

a. Waktu dan Tempat Kegiatan

Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) Wilayah Papua Selatan terus melaksanakan peran strategisnya dalam mengoordinasikan, memfasilitasi, dan mengawasi pelaksanaan program Otonomi Khusus di Papua Selatan. Laporan bulanan ini memuat rangkaian kegiatan yang dilaksanakan pada bulan Juli 2025, termasuk kegiatan resmi menghadiri Pelantikan Anggota DPR Provinsi Papua Selatan pada 4 Juli 2025 di Gedung GOR Hiadsai Kabupaten Merauke sebagai salah satu agenda penting sinergi antara eksekutif, legislatif, dan lembaga khusus Otsus.

b. Hasil / Output

- Terjalinnya komunikasi awal antara BP3OKP dan anggota DPR yang baru dilantik.
- Kesepahaman untuk mengagendakan rapat koordinasi terkait program Otsus.
- Penguatan sinergi dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan berbasis Otonomi Khusus di Papua Selatan.

c. Manfaat Kegiatan

- BP3OKP mendapatkan dukungan politik dan legislasi dari DPR dalam program-program percepatan pembangunan Otsus.
- Meningkatkan kepercayaan publik terhadap komitmen BP3OKP dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik.
- Membangun jejaring kerja lintas sektor dan pemangku kepentingan di daerah.

d. Dokumentasi Kegiatan

3. Kegiatan Konsolidasi Regional Pendidikan Dasar dan Menengah Se-Tanah Papua Tahun 2025.

a. Waktu dan Tempat Kegiatan

Waktu dan Peserta kegiatan yang terlibat dari BPP-PPS dalam penugasan sesuai dengan surat tugas Nomor ST-96/SETBPP/JYP/2025 kegiatan tersebut, adalah hari Senin-Rabu, 7-9 Juli 2025 dan bertempat di Hotel Horison Ultima Entrop Jayapura.

b. Peserta Kegiatan

1) Anggota BPP PPS :
   Yoseph Yanawo Yolmen,S.Pd.,M.Si.,MRSC
2) Anggota POKJA Papua Cerdas :
   Ir. Frederik Haryanto Sumbung, ST., M.Eng

c. Output Kegiatan

Hasil pelaksanaan kegiatan Konsolidasi Regional Pendidikan Dasar dan Menengah Se-Tanah Papua Tahun 2025, terurai sebagai berikut :

- Pendidikan dasar dan menengah menjadi fondasi paling menentukan kemajuan pendidikan pada suatu daerah
- Angka partisipasi sekolah secara umum makin mendekati universal, meski perlu peningkatan di beberapa daerah
- Kondisi sarana dan prasarana pada sebagian sekolah kita juga membutuhkan perbaikan, terutama pada SD (60%)
- Kualitas hasil belajar masih menjadi tantangan utama pendidikan kita
- Kesenjangan kualitas hasil belajar antarwilayah juga menjadi tantangan yang harus kita atasi bersama
- Upaya meningkatkan pemerataan dan kesejahteraan guru, Kemendikdasmen memfasilitasi redistribusi guru ASN pada sekolah swasta
- Kemendikdasmen mengubah sistem pengelolaan kinerja Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah yang lebih sederhana, mudah dan bermakna
- Untuk mengoptimalkan layanan pendidikan yang merata dan berkeadilan, Kemendikdasmen melakukan transformasi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB)
- Kemendikdasmen mengenalkan penguatan karakter melalui 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat
- Kemendikdasmen akan menerapkan pendekatan pembelajaran mendalam yang memuliakan agar tercipta suasana belajar dan proses pembelajaran berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan.
- Untuk menyiapkan generasi yang melek teknologi, Kemendikdasmen akan mengenalkan pelajaran koding dan kecerdasan artifisial dalam kurikulum
- Untuk memperkuat dan menyempurnakan sistem evaluasi yang merangsang budaya belajar, Kemendikdasmen menginisiasi kebijakan evaluasi yang baru
- Pemda memiliki peran paling strategis dalam pembangunan Pendidikan

- 48% dari Rp 724,2 triliun anggaran pendidikan dalam APBN juga ditransfer langsung ke daerah
- Pemda perlu mengoptimalkan sumber daya mendukung program-program prioritas Pemerintah
- Kemendikdasmen menyediakan Rapor Pendidikan untuk membantu pemda dan sekolah memantau capaian pendidikan dan melakukan perencanaan program yang lebih terarah
- Melalui Rapor Pendidikan, pemda juga dapat memantau dan merencanakan pencapaian SPM Pendidikan yang diukur oleh Kemendagri
- Pemda menjadi bagian yang mendorong partisipasi semesta demi menghadirkan pendidikan bermutu untuk semua.

d. Rekomendasi dan Tindaklanjut

Rekomendasi dan tindaklanjut kegiatan Konsolidasi Regional Pendidikan Dasar dan Menengah Se-Tanah Papua Tahun 2025, berdasarkan hasil sidang komisi I-VIII, adalah terurai sebagai berikut:

- Program Pengembangan dan Revitalisasi Satuan Pendidikan
- Digitalisasi Pembelajaran dan Penilaian (Pembelajaran Mendalam, Koding, Kecerdasan Buatan (AI)
- Penjaminan Mutu Pendidikan dan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB)
- Wajib Belajar 13 Tahun dan Pemerataan akses dan Layanan pendidikan inklusif
- Pendidikan Karakter dan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat (KAIH) dan Edukasi Makanan Bergizi
- Tata Kelola Guru dan Status Kepegawaian Guru
- Kedaulatan Bahasa Indonesia dan Revitalisasi Bahasa Daerah di Tanah Papua
- Isu Pendidikan Kontekstual Papua.

e. Dokumentasi Kegiatan

4. Pertemuan dan Meeting Bersama GIZ dan KPK

a. Waktu dan Tempat

Pada tanggal 18 Juli 2025, BP3OKP Provinsi Papua Selatan menghadiri pertemuan dengan perwakilan GIZ dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dilaksanakan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Pertemuan ini membahas berbagai agenda strategis terkait persiapan pelaksanaan program pencegahan korupsi dan pengelolaan Dana Otonomi Khusus (Otsus) di Provinsi Papua Selatan yang direncanakan pada tanggal 18-20 Agustus 2025.

b. Peserta Kegiatan.

Kegiatan ini dihadiri oleh Aggota KP3OKP, KPK dan Perwakilan GIZ.

c. Output Kegiatan

Output dari kegiatan ini yaitu:

- Pengelolaan dan penggunaan Dana Otsus Papua Selatan yang transparan, akuntabel, tepat sasaran, dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat OAP.
- Pencegahan penyelewengan Dana Otsus (Blue Grant, Specific Grant, dan DTI).
- Pemahaman yang menyeluruh bagi seluruh kepala daerah (Gubernur, Bupati) dan OPD terkait perencanaan, penggunaan, serta risiko penyalahgunaan Dana Otsus.
- Pembentukan Tim Asistensi untuk pengelolaan, pengumpulan, dan pelaporan penggunaan Dana Otsus dari setiap OPD, termasuk penyusunan RAP sebagai syarat penyaluran dana.

d. Rekomendasi

1) Rekrutmet Anggota Pokja
   - KPK dan GIZ menekankan perlunya penambahan anggota Kelompok Kerja (Pokja) di Provinsi Papua Selatan.
   - Hal ini disebabkan keterbatasan personel saat ini yang tidak mampu menangani seluruh tugas Pokja terkait percepatan pembangunan daerah.
2) Dukungan Sarana Operasional.
   - KPK mengusulkan penyediaan mobil dinas tipe 4W (4x4) seperti Pajero atau Fortuner untuk Kepala BP3OKP dan anggota Pokja.
   - Kendaraan ini diperlukan untuk mendukung kegiatan lapangan dan kunjungan kerja ke kampung-kampung terpencil dan wilayah terjauh di Provinsi Papua Selatan.

e. Tindak Lanjut

Pertemuan ini menghasilkan kesepahaman strategis antara BP3OKP, KPK, dan GIZ untuk memperkuat tata kelola Dana Otsus di Papua Selatan melalui pelatihan, pembentukan tim asistensi, penguatan Pokja, serta dukungan sarana operasional. Tindak lanjut yang akan dilakukan meliputi:

1) Koordinasi teknis penyelenggaraan Training Otsus di Merauke.
2) Proses rekrutmen anggota Pokja tambahan.
3) Pengajuan proposal kebutuhan kendaraan dinas operasional kepada pihak terkait.

f. Dokumentasi Kegiatan

5. Kegiatan Zoom Meeting Pembekalan Monitoring dan Evaluasi Dana Otsus dan DTI

a. Waktu dan Tempat Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan Ini dilakukan via zoom meting yang dilaksanakan pada Hari Rabu, tanggal 23 Juli 2025 dan bertempat di kantor BPP Papua Selatan. Link yang digunakan yaitu https://us06web.zoom.us/rec/share/wNDJXHodlH1f13_NYZxMZ2G6q3okE2RRSgaa-FBQxwFVJWthiiKCFI1 ButHQIMk.9vvzqJBBBRPY4NU

b. Peserta Kegiatan

Anggota BPP PPS, Anggota Pokja Papua Cerdas, Anggota Pokja Papua Sehat, Anggota Pokja Papua Produktif dan Staf BPP PPS.

c. Output Kegiatan
   1) Peningkatan Kapasitas Anggota BPP & Pokja
      - Memahami ketentuan peraturan perundang-undangan terkait Otsus (UU 2/2021, PP 106/2021, PP 107/2021, Perpres 24/2023, PMK 33/2024).
      - Mampu melakukan monitoring dan evaluasi terhadap input, proses, output, dan outcome pelaksanaan Dana Otsus & DTI.
   2) Tersedianya Pedoman Monev Terintegrasi
      - Berisi ruang lingkup, instrumen, tahapan, dan metode SHEK untuk evaluasi penyaluran, penyerapan, dan capaian kinerja Dana Otsus & DTI.
      - Mengacu pada mekanisme koordinasi lintas K/L, Pemerintah Provinsi, dan Kabupaten/Kota.
   3) Matriks Indikator Kinerja Monev Dana Otsus & DTI
      - Indikator ketepatan waktu penyampaian syarat salur.
      - Indikator kesesuaian belanja dengan earmarking dan dokumen perencanaan (RAP, APBD).
      - Indikator efektivitas dan efisiensi belanja.
      - Indikator pemanfaatan dan pengurangan SiLPA
   4) Dokumen Template Laporan Hasil Monev
      - Format checklist dan form reviu dokumen tahunan Pemda.
      - Format laporan lapangan (site visit) dan analisis kendala.
      - Rekomendasi strategis dan tindak lanjut perbaikan tata kelola.
   5) Pemetaan Temuan & Isu Strategis Kabupaten/Kota
      - Data kesenjangan capaian output dan outcome.
      - Analisis hambatan penyerapan dan kendala pelaporan.
      - Usulan penyelesaian masalah dan mitigasi risiko.
   6) Rencana Aksi Perbaikan Kebijakan
      - Penyesuaian model implementasi program Otsus sesuai kebutuhan riil dan kearifan lokal Papua Selatan.
      - Penguatan peran perangkat daerah, tokoh masyarakat, dan lembaga adat dalam pelaksanaan Otsus.
      - Langkah-langkah peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Dana Otsus & DTI.

d. Rekomendasi dan Tindaklanjut
   1) Penguatan Kapasitas & Pemahaman Regulasi
      - **Tindak Lanjut:** Melakukan refreshment training tahunan terkait regulasi Dana Otsus & DTI.
      - **Pelaksana:** Sekretariat BPP bekerja sama dengan Kementerian/Lembaga terkait (Kemendagri, Kemenkeu, Bappenas).
      - **Indikator Keberhasilan:** 100% anggota BPP dan Pokja memahami indikator kinerja, mekanisme syarat salur, dan prosedur pelaporan.
   2) Penyempurnaan Instrumen Monev
      - **Tindak Lanjut:** Memperbarui checklist dan format SHEK agar selaras dengan indikator RAPPP dan PMK 33/2024.
      - **Pelaksana:** Tim Teknis BPP & Pokja Papua Cerdas.
      - **Indikator Keberhasilan:** Dokumen pedoman Monev yang terstandardisasi dan digunakan seragam di seluruh kabupaten/kota di Papua Selatan.
   3) Penguatan Koordinasi Lintas Sektor
      - **Tindak Lanjut:** Membentuk forum koordinasi rutin dengan Pemda, OPD, Inspektorat, BPKP, dan tokoh adat.
      - **Pelaksana:** BPP PPS melalui rapat triwulanan di masing-masing wilayah.
      - **Indikator Keberhasilan:** Minimal 4 pertemuan koordinasi dalam setahun dengan notulen dan rencana aksi yang jelas.

4) Pemetaan Isu Strategis & Hambatan
   - **Tindak Lanjut:** Mengumpulkan dan memvalidasi data hambatan pelaksanaan Dana Otsus & DTI, baik administrasi, teknis, maupun sosial-budaya.
   - **Pelaksana:** Tim lapangan BPP dan Pokja bekerja sama dengan Bappeda dan OPD teknis.
   - **Indikator Keberhasilan:** Tersedianya database masalah yang terklasifikasi berdasarkan tingkat urgensi.
5) Penyusunan Rekomendasi Kebijakan
   - **Tindak Lanjut:** Menyusun rekomendasi kebijakan berbasis data lapangan untuk diajukan ke Setwapres dan Kementerian terkait.
   - **Pelaksana:** BPP PPS, dengan dukungan analisis dari Bappenas dan Kemenkeu.
   - **Indikator Keberhasilan:** Rekomendasi diterima dan dijadikan bahan revisi kebijakan atau juknis Dana Otsus & DTI.
6) Pelaporan & Tindak Lanjut Temuan
   - **Tindak Lanjut:** Membuat mekanisme pelaporan temuan yang dilengkapi rencana tindak lanjut (RTL) per kabupaten.
   - **Pelaksana:** Sekretariat BPP bekerja sama dengan Inspektorat.
   - **Indikator Keberhasilan:** 100% temuan lapangan memiliki RTL dengan tenggat waktu penyelesaian.

e. Dokumentasi Kegiatan

6. Kegiatan Zoom Meeting Rapat Bersama Kanwil Tentang Tanggapan Atas Proposal BPP Papua Selatan Bulan Agustus 2025

a. Waktu dan Tempat Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan ini dilakukan pada hari Selasa, tanggal 29 Juli 2025 bertempat di ruang rapat BPP papua Selatan. Dengan menggunakan Link Zoom https://us06web.zoom.us/j/82873207283?pwd=8MBNwWUCx1SR4URTXs9rudabbpo9IP.1

b. Peserta Kegiatan

Anggota BPP PPS, Anggota Pokja Papua Cerdas, Anggota Pokja Papua Sehat, Anggota Pokja Papua Produktif dan Staf BPP PPS.

c. Output Kegiatan
1) Arahan pelaksanaan kegiatan SHEK mempertimbangkan efektifitas kegiatan dan anggaran
2) Arahan kegiatan yang disampaikan dalam proposal dapat dilakukan penyesuaian dengan tetap berlandaskan program percepatan sebagaimana tertuang dalam RIPPP dan RAPPP.

d. Rekomendasi dan Tindaklanjut
1) Perbaikan dan revisi proposal kegiatan bulan agustus tahun 2025
2) Ajukan kembali usulan proposal kegiatan bulan agustus 2025 sesuai prosedur yang berlaku.

e. Dokumentasi Kegiatan

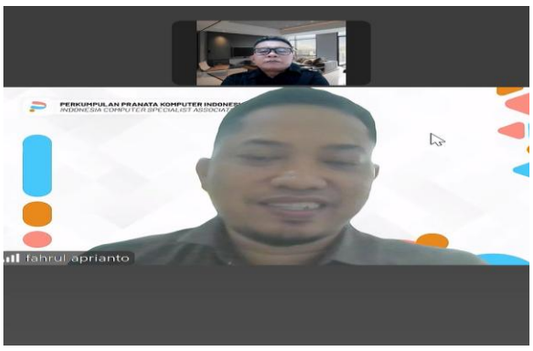

7. Kegiatan Koordinasi Pencegahan Korupsi di Papua Baratdaya

a. Waktu dan Tempat Kegiatan

Pada tanggal 30 Juli 2025, BP3OKP Provinsi Papua Selatan menghadiri pertemuan dengan perwakilan GIZ dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung KPPN Sorong. Pertemuan ini membahas berbagai isu strategis terkait pengelolaan Dana Otonomi Khusus (Otsus), percepatan pembangunan di Papua, serta peningkatan tata kelola kelembagaan BP3OKP.

b. Peserta Kegiatan

Peserta Kegiatan Anggota BP3OKP se-Papua, Perwakilan KPK RI, dan Perwakilan GIZ.

c. Poko-Pokok Pembahasan

- BP3OKP menekankan pentingnya validasi dan klarifikasi data lapangan agar kebijakan pemerintah berbasis fakta dan tidak salah arah.
- BP3OKP menyoroti keterlambatan penyaluran dana Otsus, yang umumnya disebabkan belum adanya pertanggungjawaban dari tahun sebelumnya.
- Diusulkan adanya pertemuan tatap muka antara BP3OKP dan Wapres secara rutin untuk menyampaikan evaluasi, capaian kerja, dan dinamika lapangan secara langsung.
- Mendorong pemanfaatan sekolah berasrama berbasis gereja dan budaya lokal, meniru pendekatan era sebelumnya yang terbukti efektif di wilayah terpencil.
- Menyarankan pengaktifan bandara perintis dan transportasi pendukung lainnya guna membuka akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.
- Menekankan bahwa pendekatan keamanan di Papua tidak bisa disamakan dengan daerah konflik biasa, dan harus berbasis pada kondisi sosial budaya lokal.
- Mengusulkan penguatan kelembagaan dan sistem informasi di BP3OKP, termasuk peningkatan kapasitas sekretariat untuk mendukung penyerapan anggaran dan akuntabilitas.
- Menyampaikan perlunya percepatan rekrutmen guru dan tenaga kesehatan, serta penyelarasan perencanaan pembangunan daerah berbasis sistem informasi.

d. Rekomendasi dan Tindak Lanjut

Pertemuan ini menghasilkan beberapa rekomendasi strategis bagi BP3OKP, GIZ, dan KPK, antara lain:

- Melakukan validasi data lapangan secara berkesinambungan.
- Menyusun mekanisme percepatan pertanggungjawaban Dana Otsus agar penyaluran tidak terhambat.
- Mengagendakan pertemuan rutin BP3OKP dengan Wakil Presiden.
- Mengembangkan kembali sistem sekolah berasrama berbasis gereja dan budaya lokal.
- Mengaktifkan bandara perintis dan sarana transportasi daerah terpencil.
- Mengadaptasi pendekatan keamanan sesuai konteks sosial budaya Papua.

- Memperkuat kapasitas kelembagaan BP3OKP dan sistem informasi.
- Mempercepat rekrutmen guru dan tenaga kesehatan di wilayah Provinsi Papua Selatan.

e. Dokumentasi Kegiatan

8. Kegiatan Zoom Meeting Rapat Koordinasi Persiapan Monev Provinsi Papua Selatan oleh BP3OKP

a. Waktu dan Tempat Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan ini dilakukan pada Hari Rabu, tanggal 30 Juli 2025 bertempat di ruang rapat BPP Papua Selatan. Dengan menggunakan Link Zoom https://us06web.zoom.us/j/3661190828?pwd=2OwnkMPV9bkycsZzUl1JqboHdDYshq.1.

b. Peserta Kegiatan

Anggota BPP PPS, Anggota Pokja Papua Cerdas, Anggota Pokja Papua Sehat, Anggota Pokja Papua Produktif dan Staf BPP PPS.

c. Output Kegiatan

1) Penegasan mandat BP3OKP dalam fungsi Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi (SHEK) atas pelaksanaan Dana Otsus & DTI di wilayah Papua.
2) Penentuan peran BP3OKP/BPP sebagai penghubung (bridge) antara Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pengawasan pemanfaatan Dana Otsus & DTI.
3) Kesepakatan format instrumen Monev terpadu yang memuat indikator input, proses, output, dan outcome.
4) Standarisasi checklist SHEK untuk semua wilayah Papua Selatan sesuai RAPPP dan PMK No. 33/2024.
5) Penetapan jadwal Monev tahunan dan pembagian wilayah tugas anggota BP3OKP/BPP dan Anggota POKJA BPP-PPS.

d. Rekomendasi dan Tindaklanjut

1) Penyusunan Roadmap Monev Dana Otsus & DTI yang terintegrasi dengan RAPPP.
2) Penetapan mekanisme pelaporan rutin hasil Monev dari daerah ke BP3OKP.
3) Penyampaian rekomendasi kebijakan berbasis data lapangan kepada Setwapres dan K/L terkait.

e. Dokumentasi Kegiatan

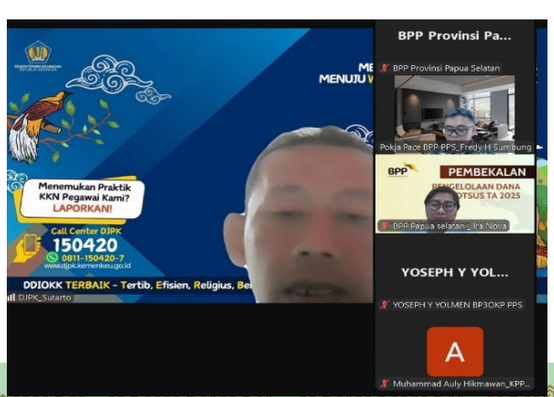

B. Pokja Papua Sehat

Rincian pelaksanaan kegiatan Pokja Papua Sehat BPP-PPS, bulan juli tahun 2025, terurai secara berurutan sebagai berikut.

1. Kunjungan ke RSUP Jayapura

a. Waktu dan Tempat

Dalam rangka memperkuat sistem pelayanan kesehatan rujukan antar provinsi dan mendukung peningkatan kapasitas sumber daya kesehatan di Papua Selatan, Pokja Papua Sehat BP3OKP Papua Selatan melaksanakan kunjungan kerja ke RSUP Jayapura. Kegiatan ini dilakukan pada 15 Juli 2025 bertempat di RSUP Jayapura dan bertujuan untuk menjalin kerja sama pelayanan rujukan antara provinsi induk dan daerah otonomi baru (DOB), serta mengeksplorasi potensi pelatihan, rotasi klinis, dan penguatan sistem informasi rujukan digital.

b. Peserta Kegiatan

- Tim Pokja Papua Sehat – BP3OKP Papua Selatan
- Direktur Utama RSUP Jayapura: dr. Petronella M. Risamasu, M.Ked.Trop

c. Hasil Kegiatan

- Komitmen RSUP Jayapura sebagai pusat rujukan utama Papua Selatan.
- Kesiapan RSUP menerima pelatihan/magang tenaga medis dari DOB.
- Rencana RSUP menjadi pusat pelatihan (hospital-based education).
- Dukungan untuk integrasi sistem rujukan antarprovinsi.
- RS vertikal Kemenkes dengan TT >500, layanan unggulan: jantung, stroke, kanker, KIA.
- Fasilitas: MRI, CT Scan, Cathlab, ICU, NICU, PICU.
- Tantangan: keterbatasan SDM spesialis menjadi peluang kolaborasi.
- Kabupaten Mappi telah menjalin komunikasi teknis rujukan sebagai percontohan

d. Rencana Tindak Lanjut

- Pengiriman tenaga medis Papua Selatan untuk pelatihan/magang.
- Pembentukan tim koordinasi rujukan lintas provinsi.
- Integrasi sistem informasi rujukan berbasis wilayah.
- Replikasi koordinasi teknis seperti Kabupaten Mappi di kabupaten lain di Provinsi Papua Selatan.

e. Dokumentasi Kegiatan

2. Kunjungan Ke Kantor BKKBN Provinsi Papua

a. Waktu dan Tempat

Dalam rangka memperkuat koordinasi lintas sektor dalam penanganan stunting, penguatan program Keluarga Berencana, dan pembangunan kesehatan masyarakat di Papua Selatan, Pokja Papua Sehat melakukan kunjungan ke Kantor BKKBN Provinsi Papua. Kegiatan ini dilakukan pada 17 Juli 2025 di Kantor BKKBN Kab Jayapura. Kegiatan ini juga bertujuan untuk memperdalam sinergi antarlembaga serta memastikan keberlanjutan program nasional di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, khususnya dalam konteks daerah otonomi baru (DOB) Papua Selatan.

b. Peserta Kegiatan

- Tim Pokja Papua Sehat – BP3OKP Papua Selatan
- Sekretaris BKKBN Provinsi Papua

c. Hasil Kegiatan

- Penanganan stunting berbasis keluarga berisiko.
- Pelaksanaan program KB di wilayah Papua Selatan.
- Sinkronisasi program dengan OPD teknis daerah seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan, dan Dinas Sosial.
- Pentingnya dukungan data lintas instansi untuk memantau outcome program.
- Tantangan akurasi dan konsistensi data dari kabupaten DOB.
- Perlu validasi dan integrasi data KB dengan laporan OPD terkait.
- Praktik kunjungan lapangan untuk klarifikasi capaian indikator.
- Strategi monitoring disesuaikan dengan keterbatasan akses wilayah.
- Dukungan terhadap Program Stunting **:** anggaran pusat masih tersedia, meski tidak terpusat dan sangat perlu Pendekatan intervensi keluarga, gizi, dan sanitasi rumah.
- Isu dan Tantangan Lintas Sektor **:** Tantangan internal OPD dalam pelaksanaan program nasional dan Kebutuhan penguatan koordinasi lintas OPD dan fasilitasi teknis.

d. Rencana Tindak Lanjut

1) Koordinasi Lintas Sektor Provinsi
   - Menyusun agenda pertemuan koordinasi teknis antara BP3OKP Papua Selatan, BKKBN Provinsi Papua, dan OPD terkait (Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Sosial, Bappeda).
   - Mendorong pembentukan tim kerja lintas sektor di tingkat provinsi untuk penanganan stunting dan penguatan program KB berbasis keluarga risiko tinggi.
2) Pendampingan Teknis di Kabupaten/Kota
   - Menyusun roadmap pendampingan program KB dan stunting di empat kabupaten Papua Selatan (Merauke, Mappi, Boven Digoel, Asmat).
   - Menjadwalkan kunjungan lapangan bersama tim provinsi dan kabupaten untuk validasi data, klarifikasi indikator, serta supervisi pelaksanaan kegiatan di lapangan.
3) Penguatan Integrasi Data dan Sistem Pelaporan
   - Mengembangkan template pelaporan terpadu berbasis keluarga yang menggabungkan indikator KB, stunting, gizi, sanitasi, dan kesehatan ibu-anak.
   - Melakukan sinkronisasi data antara BKKBN, Dinas Kesehatan, dan OPD lain untuk memastikan keakuratan dan konsistensi data capaian.
4) Advokasi Penguatan Kelembagaan dan Pendanaan
   - Mengadvokasi pengalokasian anggaran daerah dan pusat untuk intervensi program KB dan stunting secara berkelanjutan di wilayah DOB.
   - Mendorong integrasi program KB dan stunting ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah (RKPD, Renstra OPD, dan RPJMD Kabupaten).

5) Peningkatan Kapasitas SDM
   - Menyelenggarakan pelatihan teknis bagi tenaga lapangan dan kader kesehatan terkait intervensi KB, konseling keluarga berisiko, dan pemantauan tumbuh kembang anak.
   - Mengusulkan dukungan dari BKKBN dan mitra pembangunan untuk pelatihan kader dan penguatan jejaring layanan di wilayah 3T

6) Pemantauan dan Evaluasi
   - Menyusun mekanisme monev bersama yang melibatkan BP3OKP, BKKBN, dan OPD terkait dalam memantau implementasi program KB dan stunting secara periodik.
   - Mengintegrasikan indikator capaian KB dan stunting ke dalam mekanisme pelaporan Otsus dan forum evaluasi kinerja daerah.

e. Dokumentasi Kegiatan

3. Kunjungan Ke Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Labkesmas) Provinsi Papua

a. Waktu dan Tempat Kegiatan

Kegiatan ini dilakukan pada hari Rabu, Tanggal 17 Juli 2025 dan bertempat di Labkesmas Papua, Jayapura.

b. Peserta Kegiatan
   - Tim Pokja Papua Sehat – BP3OKP Papua Selatan
   - Perwakilan Labkesmas Papua

c. Hasil Kegiatan

1) Struktur Tier Layanan Kesehatan :
   - Sistem layanan disusun menjadi Tier 1–5 dari layanan primer hingga nasional.
   - Di Papua Selatan, hanya Kabupaten Merauke memiliki fasilitas Tier 2.
   - Beban pembinaan masih dominan ditangani pusat.

2) Program Penguatan Laboratorium Kesehatan :
   - Tersedia hibah dari program IMPULSE (UE) dan Shopee CSR untuk alat, SDM, dan pembangunan laboratorium.
   - Syarat: proposal teknis, lahan siap bangun, standar Permenkes No. 18/2021.

3) Klinik Desa & Pemeriksaan Kesehatan Gratis :
   - Klinik desa dijalankan melalui koperasi "Merah Putih".
   - Lokasi percontohan: Distrik Kurik, Kabupaten Merauke.
   - Pemeriksaan ulang tahun mencakup ginjal, kolesterol, dll.
   - Kendala: alat rusak, distribusi tidak merata, SDM belum terlatih.

d. Rencana Tindak Lanjut
   - Pemerintah kabupaten/kota segera identifikasi lahan dan siapkan proposal.
   - BP3OKP membantu fasilitasi komunikasi dan dokumen daerah ke kementerian.

e. Dokumentasi Kegiatan

4. Pertemuan Reviu Rancangan Akhir Dokumen Rpjmd Provisi Papua Selatan Bersama Inspektorat, Baperida, Bpkp Dan Skala

a. Waktu dan Tempat Kegiatan

Kegiatan ini dilakukan pada hari Kamis, tanggal 30 Juli 2025 dan bertempat di Aula Kantor Inspektorat Provinsi Papua Selatan di Merauke.

b. Peserta Kegiatan

- Tim Ispektorat
- Tim Baperida
- Tim BPKP
- Tim Skala
- Anggota Pokja Papua Cerdas
- Anggota Pokja Papua Sehat

c. Hasil Kegiatan

- Ditemukan sejumlah ketidaksinkronan antara Bab II (Gambaran Umum Daerah), Bab III (Strategi dan Arah Kebijakan), dan Bab IV (Program Prioritas).
- Masih terdapat ketidaksesuaian antara target kinerja dan kondisi aktual.
- Pokja mendorong konsistensi antara gambaran umum daerah, arah kebijakan, dan indikator sektoral dalam dokumen RPJMD.
- Pokja menekankan pentingnya integrasi indikator SPM, RIPPP, dan dokumen RPJPD dalam struktur RPJMD 2025–2029.
- Disampaikan pula usulan indikator terkait keamanan dan insentif tenaga kesehatan di wilayah 3T dan dukungan Otsus untuk tenaga medis
- Pokja mengusulkan agar Pengendalian penyakit infeksi seperti Malaria, TBC, dan Stunting diakomodasi sebagai dasar perencanaan dan indikator prioritas provinsi.
- Mengusulkan kesejahteraan tenaga kesehatan, termasuk insentif berbasis wilayah terpencil menjadi indikator sasaran
- Masih terdapat kekosongan dalam dokumen pendukung seperti KLHS, RTRW final, serta Renstra OPD.
- Beberapa data yang digunakan dalam indikator belum sepenuhnya berdasarkan sumber data provinsi atau kabupaten.
- Hasil reviu dokumen RPJMD oleh Inspektorat
- Ketidaksesuaian antara program dan outcome.
- Ketidaklengkapan indikator dan baseline capaian.
- Kebutuhan pelengkapan dokumen Renstra, KLHS, dan dokumen turunan lainnya.
- Pentingnya memperjelas pengukuran keberhasilan capaian visi-misi dan program unggulan.
- Pokja Papua Sehat menilai bahwa hasil reviu ini harus ditindaklanjuti secara serius agar dokumen perencanaan daerah dapat menjadi acuan pembangunan yang akurat dan responsif terhadap kondisi kesehatan masyarakat Papua Selatan.
- Indikator mandiri terkait Martabat Orang Asli Papua yang harus diperjuangkan ke bapenas, di harapkan bantuan dari BP3OKP untuk mengawal usulan tersebut.

d. Rencana Tindak Lanjut
- Proses sinkronisasi dokumen RPJMD, Renstra OPD dan penganggaran SPM.
- Beprida melakukan agenda audiensi bersama SKPD teknis untuk membahas pelaksanaan program prioritas kesehatan.
- BP3OKP membantu mengawal usulan Indikator mandiri Martabat OAP ke BAPENAS.

e. Dokumentasi Kegiatan

5. Penguatan Peran Bp3okp Dalam Pelaksanaan Monitoring Dan Evaluasi Dana Otsus Dan Dti Oleh Djpk.

a. Waktu Kegiatan

Kegiatan ini dilakukan pada 30 Juli 2025 di Ruang Rapat BP3OKP Papua Selatan dan dilakukan secara zoom.

b. Peserta Kegiatan

Peserta kegiatan ini adalah Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK). Kegiatan ini diikuti oleh anggota Badan Pengarah Papua (BPP), Pokja Papua Sehat, Pokja Papua Cerdas, serta Sekretariat BP3OKP Papua Selatan.

c. Hasil Kegiatan
- DJPK menekankan pentingnya pelaporan tahunan yang tepat waktu dan akurat dari provinsi/kabupaten terkait penggunaan Dana Otsus.
- Dipaparkan ruang lingkup pembinaan dan Monev yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi Dana Otsus.
- Ditekankan bahwa fungsi BP3OKP bersifat koordinatif (tidak operasional), tetapi sangat strategis dalam mengorkestrasi proses Monev dan pelaporan lintas sektor.
- Pokja Papua Sehat diharapkan dapat menjadi pelaksana teknis dalam mendampingi penyusunan laporan capaian Dana Otsus bidang kesehatan, serta membantu validasi output di lapangan.
- DJPK menyampaikan instrumen monev dan draft kuesioner yang akan digunakan dalam pelaporan tahun berjalan, yang perlu diisi bersama perangkat daerah terkait

d. Rencana Tindak Lanjut
- Mengadakan pertemuan koordinasi dengan OPD teknis terkait (Dinas Kesehatan, Bappeda, BPKAD, Inspektorat) guna menyelaraskan kegiatan Dana Otsus yang akan dimonitor.
- Menyusun daftar kegiatan Dana Otsus tahun berjalan yang menjadi objek evaluasi bersama DJPK.
- Mengidentifikasi sumber data primer dan sekunder yang relevan dengan pelaksanaan Dana Otsus sektor kesehatan.
- Memberi saran kepada pemerintah daerah untuk memberikan label pada kegiatan yang di Danai Otsus tahun 2025

- Berkoordinasi dengan DJPK untuk mendapatkan akses dan pendampingan teknis dalam penggunaan aplikasi pelaporan Dana Otsus secara digital.
- Mendorong OPD teknis untuk menggunakan sistem yang terintegrasi dengan DJPK dan memperbarui data secara berkala.

e. Dokumentasi Kegiatan

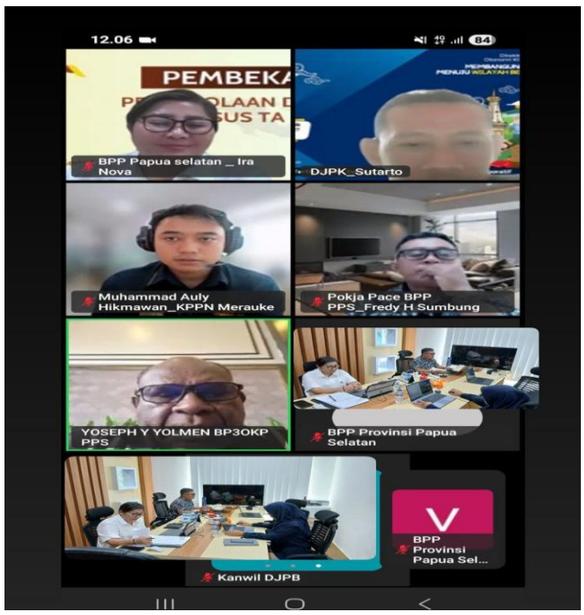

C. Pokja Papua Cerdas

Rincian pelaksanaan kegiatan Pokja Papua Cerdas BPP-PPS, bulan juli tahun 2025, terurai secara berurutan sebagai berikut.

1. Kegiatan Konsolidasi Regional Pendidikan Dasar dan Menengah Se-Tanah Papua Tahun 2025.

a. Waktu dan Tempat Kegiatan

Waktu dan Peserta kegiatan yang terlibat dari BPP-PPS dalam penugasan sesuai dengan surat tugas Nomor ST-96/SETBPP/JYP/2025 kegiatan tersebut, adalah hari Senin-Rabu, 7-9 Juli 2025 dan bertempat di Hotel Horison Ultima Entrop Jayapura.

b. Peserta Kegiatan

1) Anggota BPP PPS :
   Yoseph Yanawo Yolmen,S.Pd.,M.Si.,MRSC
2) Anggota POKJA Papua Cerdas :
   Ir. Frederik Haryanto Sumbung, ST., M.Eng

c. Output Kegiatan

Hasil pelaksanaan kegiatan Konsolidasi Regional Pendidikan Dasar dan Menengah Se-Tanah Papua Tahun 2025, terurai sebagai berikut :

- Pendidikan dasar dan menengah menjadi fondasi paling menentukan kemajuan pendidikan pada suatu daerah
- Angka partisipasi sekolah secara umum makin mendekati universal, meski perlu peningkatan di beberapa daerah
- Kondisi sarana dan prasarana pada sebagian sekolah kita juga membutuhkan perbaikan, terutama pada SD (60%)
- Kualitas hasil belajar masih menjadi tantangan utama pendidikan kita
- Kesenjangan kualitas hasil belajar antarwilayah juga menjadi tantangan yang harus kita atasi bersama

- Upaya meningkatkan pemerataan dan kesejahteraan guru, Kemendikdasmen memfasilitasi redistribusi guru ASN pada sekolah swasta
- Kemendikdasmen mengubah sistem pengelolaan kinerja Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah yang lebih sederhana, mudah dan bermakna
- Untuk mengoptimalkan layanan pendidikan yang merata dan berkeadilan, Kemendikdasmen melakukan transformasi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB)
- Kemendikdasmen mengenalkan penguatan karakter melalui 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat
- Kemendikdasmen akan menerapkan pendekatan pembelajaran mendalam yang memuliakan agar tercipta suasana belajar dan proses pembelajaran berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan.
- Untuk menyiapkan generasi yang melek teknologi, Kemendikdasmen akan mengenalkan pelajaran koding dan kecerdasan artifisial dalam kurikulum
- Untuk memperkuat dan menyempurnakan sistem evaluasi yang merangsang budaya belajar, Kemendikdasmen menginisiasi kebijakan evaluasi yang baru
- Pemda memiliki peran paling strategis dalam pembangunan Pendidikan
- 48% dari Rp 724,2 triliun anggaran pendidikan dalam APBN juga ditransfer langsung ke daerah
- Pemda perlu mengoptimalkan sumber daya mendukung program-program prioritas Pemerintah
- Kemendikdasmen menyediakan Rapor Pendidikan untuk membantu pemda dan sekolah memantau capaian pendidikan dan melakukan perencanaan program yang lebih terarah
- Melalui Rapor Pendidikan, pemda juga dapat memantau dan merencanakan pencapaian SPM Pendidikan yang diukur oleh Kemendagri
- Pemda menjadi bagian yang mendorong partisipasi semesta demi menghadirkan pendidikan bermutu untuk semua.

d. Rekomendasi dan Tindaklanjut

Rekomendasi dan tindaklanjut kegiatan Konsolidasi Regional Pendidikan Dasar dan Menengah Se-Tanah Papua Tahun 2025, berdasarkan hasil sidang komisi I-VIII, adalah terurai sebagai berikut:

- Program Pengembangan dan Revitalisasi Satuan Pendidikan
- Digitalisasi Pembelajaran dan Penilaian (Pembelajaran Mendalam, Koding, Kecerdasan Buatan (AI)
- Penjaminan Mutu Pendidikan dan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB)
- Wajib Belajar 13 Tahun dan Pemerataan akses dan Layanan pendidikan inklusif
- Pendidikan Karakter dan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat (KAIH) dan Edukasi Makanan Bergizi
- Tata Kelola Guru dan Status Kepegawaian Guru
- Kedaulatan Bahasa Indonesia dan Revitalisasi Bahasa Daerah di Tanah Papua
- Isu Pendidikan Kontekstual Papua.

e. Dokumentasi Kegiatan

2. Kegiatan Zoom Meeting Pembekalan Monitoring dan Evaluasi Dana Otsus dan DTI

a. Waktu dan Tempat Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan Ini dilakukan via zoom meting yang dilaksanakan pada Hari Rabu, tanggal 23 Juli 2025 dan bertempat di kantor BPP Papua Selatan. Link yang digunakan yaitu https://us06web.zoom.us/rec/share/wNDJXHodlH1f13_NYZxMZ2G6q3okE2RRSgaa-FBQxwFVJWthiiKCFI1 ButHQIMk.9vvzqJBBBRPY4NU

b. Peserta Kegiatan

Anggota BPP PPS, Anggota Pokja Papua Cerdas, Anggota Pokja Papua Sehat, Anggota Pokja Papua Produktif dan Staf BPP PPS.

c. Output Kegiatan

1) Peningkatan Kapasitas Anggota BPP & Pokja
   - Memahami ketentuan peraturan perundang-undangan terkait Otsus (UU 2/2021, PP 106/2021, PP 107/2021, Perpres 24/2023, PMK 33/2024).
   - Mampu melakukan monitoring dan evaluasi terhadap input, proses, output, dan outcome pelaksanaan Dana Otsus & DTI.

1) Tersedianya Pedoman Monev Terintegrasi
   - Berisi ruang lingkup, instrumen, tahapan, dan metode SHEK untuk evaluasi penyaluran, penyerapan, dan capaian kinerja Dana Otsus & DTI.
   - Mengacu pada mekanisme koordinasi lintas K/L, Pemerintah Provinsi, dan Kabupaten/Kota.

2) Matriks Indikator Kinerja Monev Dana Otsus & DTI
   - Indikator ketepatan waktu penyampaian syarat salur.
   - Indikator kesesuaian belanja dengan earmarking dan dokumen perencanaan (RAP, APBD).
   - Indikator efektivitas dan efisiensi belanja.
   - Indikator pemanfaatan dan pengurangan SiLPA

3) Dokumen Template Laporan Hasil Monev
   - Format checklist dan form reviu dokumen tahunan Pemda.
   - Format laporan lapangan (site visit) dan analisis kendala.
   - Rekomendasi strategis dan tindak lanjut perbaikan tata kelola.

4) Pemetaan Temuan & Isu Strategis Kabupaten/Kota
   - Data kesenjangan capaian output dan outcome.
   - Analisis hambatan penyerapan dan kendala pelaporan.
   - Usulan penyelesaian masalah dan mitigasi risiko.

5) Rencana Aksi Perbaikan Kebijakan
   - Penyesuaian model implementasi program Otsus sesuai kebutuhan riil dan kearifan lokal Papua Selatan.
   - Penguatan peran perangkat daerah, tokoh masyarakat, dan lembaga adat dalam pelaksanaan Otsus.
   - Langkah-langkah peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Dana Otsus & DTI.

d. Rekomendasi dan Tindaklanjut

1) Penguatan Kapasitas & Pemahaman Regulasi
   - **Tindak Lanjut:** Melakukan refreshment training tahunan terkait regulasi Dana Otsus & DTI.
   - **Pelaksana:** Sekretariat BPP bekerja sama dengan Kementerian/Lembaga terkait (Kemendagri, Kemenkeu, Bappenas).
   - **Indikator Keberhasilan:** 100% anggota BPP dan Pokja memahami indikator kinerja, mekanisme syarat salur, dan prosedur pelaporan.

2) Penyempurnaan Instrumen Monev
   - **Tindak Lanjut:** Memperbarui checklist dan format SHEK agar selaras dengan indikator RAPPP dan PMK 33/2024.
   - **Pelaksana:** Tim Teknis BPP & Pokja Papua Cerdas.
   - **Indikator Keberhasilan:** Dokumen pedoman Monev yang terstandardisasi dan digunakan seragam di seluruh kabupaten/kota di Papua Selatan.
3) Penguatan Koordinasi Lintas Sektor
   - **Tindak Lanjut:** Membentuk forum koordinasi rutin dengan Pemda, OPD, Inspektorat, BPKP, dan tokoh adat.
   - **Pelaksana:** BPP PPS melalui rapat triwulanan di masing-masing wilayah.
   - **Indikator Keberhasilan:** Minimal 4 pertemuan koordinasi dalam setahun dengan notulen dan rencana aksi yang jelas.
4) Pemetaan Isu Strategis & Hambatan
   - **Tindak Lanjut:** Mengumpulkan dan memvalidasi data hambatan pelaksanaan Dana Otsus & DTI, baik administrasi, teknis, maupun sosial-budaya.
   - **Pelaksana:** Tim lapangan BPP dan Pokja bekerja sama dengan Bappeda dan OPD teknis.
   - **Indikator Keberhasilan:** Tersedianya database masalah yang terklasifikasi berdasarkan tingkat urgensi.
5) Penyusunan Rekomendasi Kebijakan
   - **Tindak Lanjut:** Menyusun rekomendasi kebijakan berbasis data lapangan untuk diajukan ke Setwapres dan Kementerian terkait.
   - **Pelaksana:** BPP PPS, dengan dukungan analisis dari Bappenas dan Kemenkeu.
   - **Indikator Keberhasilan:** Rekomendasi diterima dan dijadikan bahan revisi kebijakan atau juknis Dana Otsus & DTI.
6) Pelaporan & Tindak Lanjut Temuan
   - **Tindak Lanjut:** Membuat mekanisme pelaporan temuan yang dilengkapi rencana tindak lanjut (RTL) per kabupaten.
   - **Pelaksana:** Sekretariat BPP bekerja sama dengan Inspektorat.
   - **Indikator Keberhasilan:** 100% temuan lapangan memiliki RTL dengan tenggat waktu penyelesaian

e. Dokumentasi Kegiatan

3. Kegiatan Zoom Meeting Rapat Bersama Kanwil Tentang Tanggapan Atas Proposal BPP Papua Selatan Bulan Agustus 2025

a. Waktu dan Tempat Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan ini dilakukan pada hari Selasa, tanggal 29 Juli 2025 bertempat di ruang rapat BPP papua Selatan. Dengan menggunakan Link Zoom https://us06web.zoom.us/j/82873207283?pwd=8MBNwWUCx1SR4URTXs9rudabbpo9IP.1

b. Peserta Kegiatan

Anggota BPP PPS, Anggota Pokja Papua Cerdas, Anggota Pokja Papua Sehat, Anggota Pokja Papua Produktif dan Staf BPP PPS.

c. Output Kegiatan
   1) Arahan pelaksanaan kegiatan SHEK mempertimbangkan efektifitas kegiatan dan anggaran
   2) Arahan kegiatan yang disampaikan dalam proposal dapat dilakukan penyesuaian dengan tetap berlandaskan program percepatan sebagaimana tertuang dalam RIPPP dan RAPPP.

d. Rekomendasi dan Tindaklanjut
   1) Perbaikan dan revisi proposal kegiatan bulan agustus tahun 2025
   2) Ajukan kembali usulan proposal kegiatan bulan agustus 2025 sesuai prosedur yang berlaku.

e. Dokumentasi Kegiatan

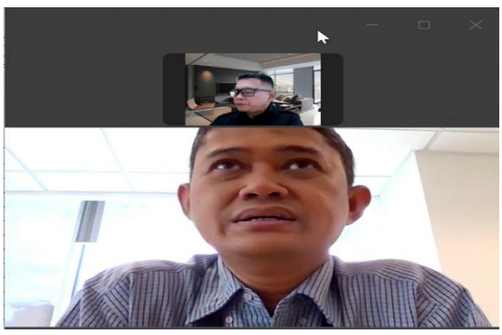

4. Kegiatan Zoom Meeting Rapat Koordinasi Persiapan Monev Provinsi Papua Selatan oleh BP3OKP

a. Waktu dan Tempat Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan ini dilakukan pada Hari Rabu, tanggal 30 Juli 2025 bertempat di ruang rapat BPP Papua Selatan. Dengan menggunakan Link Zoom https://us06web.zoom.us/j/3661190828?pwd=2OwnkMPV9bkycsZzUl1JqboHdDYshq.1.

b. Peserta Kegiatan

Anggota BPP PPS, Anggota Pokja Papua Cerdas, Anggota Pokja Papua Sehat, Anggota Pokja Papua Produktif dan Staf BPP PPS.

c. Output Kegiatan
   1) Penegasan mandat BP3OKP dalam fungsi Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi (SHEK) atas pelaksanaan Dana Otsus & DTI di wilayah Papua.
   2) Penentuan peran BP3OKP/BPP sebagai penghubung (bridge) antara Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pengawasan pemanfaatan Dana Otsus & DTI.
   3) Kesepakatan format instrumen Monev terpadu yang memuat indikator input, proses, output, dan outcome.
   4) Standarisasi checklist SHEK untuk semua wilayah Papua Selatan sesuai RAPPP dan PMK No. 33/2024.
   5) Penetapan jadwal Monev tahunan dan pembagian wilayah tugas anggota BP3OKP/BPP dan Anggota POKJA BPP-PPS.

d. Rekomendasi dan Tindaklanjut
   4) Penyusunan Roadmap Monev Dana Otsus & DTI yang terintegrasi dengan RAPPP.
   5) Penetapan mekanisme pelaporan rutin hasil Monev dari daerah ke BP3OKP.
   6) Penyampaian rekomendasi kebijakan berbasis data lapangan kepada Setwapres dan K/L terkait.

e. Dokumentasi Kegiatan

5. Pertemuan Finalisasi Review Ranhir RPJMD.

a. Waktu dan Tempat Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 30 Juli 2025 bertempat di Ruang Rapat Inspektorat Propinsi Papua Selatan.

b. Peserta Kegiatan

Anggota BPP PPS, Anggota Pokja Papua Cerdas, Anggota Pokja Papua Sehat, dan Anggota Pokja Papua Produktif.

c. Output Kegiatan

1) Memperoleh penyelarasan hasil Review RPJMD oleh APIP, bersama Pemda Provinsi Papua Selatan, sesuai dengan RIPPP dan RAPPP.
2) Program Martabat merupakan hasil interaksi pimpimnan daerah terkait Pola dan Perilaku Masyarakat Papua Selatan yang perlu terintegrasi dalam RPJMD.

d. Rekomendasi dan Tindaklanjut

1) Perbaikan RPJMD berdasarkan hasil Review
2) Lakukan Pertemuan Finalisasi sebelum diajukan untuk ditetapkan sesuai peraturan yang berlaku.

e. Dokumentasi Kegiatan

VI. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan laporan kegiatan Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) Perwakilan Provinsi Papua Selatan selama bulan Juli 2025, dapat disimpulkan bahwa:

1. **Peran Strategis BP3OKP Papua Selatan** telah terlaksana dengan baik melalui fungsi fasilitasi, koordinasi, dan pengawasan program Otonomi Khusus (Otsus). Kegiatan yang dilaksanakan mencakup bidang pendidikan, kesehatan, kebijakan pembangunan, serta monitoring dan evaluasi (monev) Dana Otsus, yang sejalan dengan prinsip keadilan sosial dan pemberdayaan Orang Asli Papua (OAP).

2. **Capaian Signifikan** terlihat dari hasil kunjungan kerja, audiensi, dan koordinasi lintas sektor, seperti:
   - Komitmen pendirian Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Masyarakat di Universitas Musamus Merauke.
   - Penguatan sistem rujukan kesehatan antarprovinsi dan kolaborasi dengan RSUP Jayapura.
   - Peningkatan kapasitas anggota BP3OKP dan Pokja dalam monev Dana Otsus melalui pelatihan terstruktur.
   - Pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) Dana Otsus dan DTI secara terstruktur, serta penguatan koordinasi dengan KPK, GIZ, dan pemerintah daerah untuk transparansi pengelolaan dana.
   - Sinkronisasi RPJMD Provinsi Papua Selatan dengan indikator Otsus, termasuk integrasi program prioritas seperti pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat adat.

3. **Tantangan Utama** meliputi:
   - Kesenjangan infrastruktur dan SDM di wilayah terpencil, terutama dalam layanan kesehatan dan pendidikan.
   - Perlunya integrasi data dan penguatan koordinasi antar-OPD untuk memastikan akurasi pelaporan.
   - Pentingnya pendampingan teknis bagi pemerintah kabupaten/kota dalam mengoptimalkan Dana Otsus.

4. **Dampak**:
   - Meningkatnya partisipasi Orang Asli Papua (OAP) dalam pembangunan daerah.
   - Penguatan kapasitas kelembagaan BP3OKP dan Pokja dalam mendukung program Otsus yang berkelanjutan.

B. Saran

Untuk optimalisasi pelaksanaan program Otonomi Khusus ke depan, BP3OKP Provinsi Papua Selatan merekomendasikan:

1. **Penguatan Kelembagaan**:
   - Penambahan anggota Pokja dan penyediaan sarana operasional (mobil dinas) untuk mendukung mobilitas di wilayah terpencil.
   - Peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan teknis dan pendampingan regulasi Dana Otsus.

2. **Peningkatan Akuntabilitas**:
   - Integrasi sistem pelaporan digital antara pemerintah daerah, K/L terkait, dan BP3OKP untuk memantau penyerapan Dana Otsus secara real-time.
   - Sosialisasi mekanisme pengaduan masyarakat guna mendeteksi potensi penyimpangan dana.

3. **Percepatan Pembangunan Berbasis Kearifan Lokal**:
   - Memprioritaskan program yang menyasar kebutuhan riil OAP, seperti sekolah berasrama berbasis budaya lokal dan layanan kesehatan di daerah 3T.
   - Memperkuat kolaborasi dengan tokoh adat dan lembaga swadaya masyarakat dalam perencanaan program.

4. **Tindak Lanjut Kebijakan**:
   - Mengadvokasi revisi kebijakan Otsus berbasis temuan lapangan, termasuk usulan insentif tenaga medis/guru di wilayah terpencil.
   - Memastikan dokumen perencanaan (RPJMD, RAPPP) terintegrasi dengan indikator kinerja Otsus.

C. Harapan

Laporan ini menjadi bukti komitmen BP3OKP Papua Selatan dalam mendorong pembangunan yang berkeadilan dan berbasis kearifan lokal. Melalui kolaborasi multipihak, langkah-langkah strategis yang telah dirancang diharapkan mampu mempercepat terwujudnya visi **Papua Selatan yang Cerdas, Sehat, dan Produktif**. Ke depan, BP3OKP akan terus memperkuat perannya sebagai penghubung antara pemerintah, masyarakat adat, dan lembaga terkait, dengan fokus pada akuntabilitas, transparansi, dan peningkatan kualitas hidup OAP.

Merauke, 13 Agustus 2025
Kepala BP3OKP Provinsi Papua Selatan

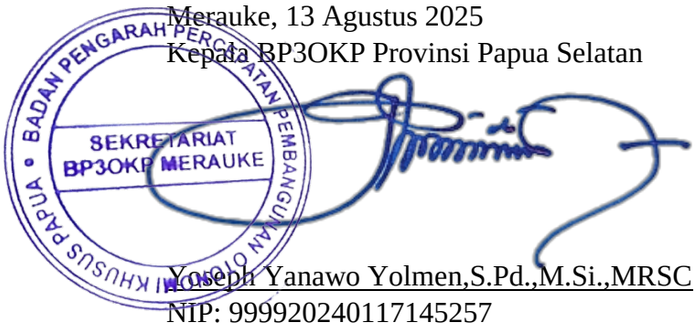

Yoseph Yanawo Yolmen,S.Pd.,M.Si.,MRSC
NIP: 999920240117145257